



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

47 Desa Tunggak Pajak DD

KOTA BINTUHAN - Sebanyak 47 desa di Kabupaten Kaur diketahui menunggak pajak dari penggunaan dana desa (DD) sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Hal ini menjadi perhatian serius Inspektorat Kabupaten Kaur. Dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan dan aparat penegak hukum, untuk mendesak desa-desa tersebut untuk membayar pajak terhutangnya.

Kepala Inspektorat Kaur Three Marnope saat dikonfirmasi membenarkan kalau banyak desa di Kaur yang menunggak pajak DD. Akan segera dipanggil untuk segera melunasi pajak yang nunggak baik itu tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk itu pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pajak agar mereka mengeluarkan nominal pajak yang nunggak setiap bulannya.

"Kita cek masih banyak desa yang nunggak pajak, data yang ada ada 47 desa yang nunggak pajak tahun 2018 dan 2019. Ini semua akan kita panggil

bersama dengan pihak KP2KP, karena pihak pajak lah yang tahu berapa nominal tunggakan desa-desa tersebut setiap tahunnya. Dan ini wajib harus dibayar jika tidak akan kita kenakan sanksi nantinya dan siapa

yang menggunakan DD tersebut harus bertanggungjawab atas pajaknya," kata Three Marnope.

Pihaknya juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kejari Kaur terkait dengan penagi-

han pajak desa yang nunggak ini. Pihak Kejari Kaur akan turun untuk melakukan penagihan jika pihak pajak sudah mengeluarkan nominal tunggakan pajak setiap desa. Tidak hanya dua tahun menunggak pajak yang menjadi sorotan saat ini. Ada juga desa yang menunggak pajak tahun 2019 saja yaitu sekitar 12 desa lagi. Kemudian ada juga desa yang membayar pajak namun nominalnya sangat kecil dan di bawah angka Rp 15 juta. Untuk desa yang membayar pajak tidak wajar ini ada sekitar 24 desa. Dan desa-desa ini juga akan dipanggil terkait pajak yang dibayarkan karena diduga masih banyak yang kurang.

"Desa yang per tahunnya hanya bayar pajak Rp 3 juta dengan DD sampai Rp 800 juta itu kan tidak mungkin. Makanya yang pajaknya tidak wajar ini juga akan kita panggil dan kita periksa dan kita minta mereka keluarkan pajak yang sebenarnya. Jangan hanya setor pajak saja dan terkesan lepas kewajiban namun tidak sesuai dengan dana yang telah direalisasikan,"pungkas Three Marnope. (cik)